

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah merupakan suatu proses perubahan terencana yang melibatkan seluruh kegiatan dengan dukungan masyarakat yang berperan di berbagai sektor yang bertujuan untuk meratakan serta menyeimbangkan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Ketimpangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki. Adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, serta tenaga terampil (Barika, 2012).

Sumber-sumber yang terbatas akan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan dalam pembangunan daerah. Demikian pula dengan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia, di dalam proses pembangunan daerahnya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menghambat laju pembangunan daerah. Berbagai permasalahan yang timbul mendorong pemerintah daerah untuk

membuat suatu kebijakan karena pemerintah daerahlah yang memiliki hak dan wewenang dalam memperlancar jalannya pembangunan daerah.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pembangunan ekonomi pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah relatif maju (*development region*) dan wilayah relatif terbelakang (*underdeveloped region*). Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah selanjutnya akan membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan. Maka aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2012).

Potensi tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari seberapa besar tingkat PDRB di setiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan tentang pendapatan per kapita di setiap daerahnya. Perhatian ini bermaksud untuk menghindarkan pemerintah daerah dari kesalahan-kesalahan dalam

penentuan program pembangunan yang sesuai dengan masing-masing daerah, karena dari setiap masing-masing daerah memiliki permasalahan, kondisi dan potensi yang berbeda.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Tabel I-1.

Berdasarkan Tabel I-1 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlihat dari rata-rata PDRB pada tahun 2012 sebesar Rp. 5,270,943.53 juta rupiah meningkat secara drastis pada tahun 2013 menjadi Rp. 20,761,488.89 juta rupiah, tetapi sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi Rp. 21,806,277.54 juta rupiah. Sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 PDRB naik menjadi Rp. 23,001,231.96 juta rupiah.

Menurut Tabel I-1 pada tahun 2012 Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB tertinggi adalah Kabupaten Cilacap. Tetapi pada tahun 2013 PDRB tertinggi adalah Kota Semarang, karena mengalami peningkatan PDRB yang cukup drastis dari tahun sebelumnya.

**Tabel I-1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2012-2015 (Juta Rupiah)**

Kabupaten/Kota		2012	2013	2014	2015*
Kabupaten					
1	Cilacap	25,452,057.81	81,022,670.26	83,391,500.18	88,347,606.68
2	Banyumas	5,221,519.49	27,793,138.47	29,367,687.40	31,164,876.40
3	Purbalingga	2,845,663.33	12,778,311.23	13,397,712.78	14,125,812.26
4	Banjarnegara	3,189,651.65	11,043,083.01	11,629,845.85	12,266,046.35
5	Kebumen	3,242,111.77	14,333,333.50	15,163,091.84	16,115,554.01
6	Purworejo	3,327,672.40	9,870,969.95	10,312,937.79	10,866,645.98
7	Wonosobo	2,075,562.03	10,333,757.05	10,828,168.68	11,353,869.94
8	Magelang	4,542,888.65	17,020,755.61	17,936,288.38	18,838,351.97
9	Boyolali	4,725,558.65	16,266,498.68	17,148,350.76	18,160,983.95
10	Klaten	5,211,757.15	20,241,429.01	21,424,522.36	22,558,976.15
11	Sukoharjo	5,468,708.95	19,401,889.44	20,449,009.84	21,612,078.19
12	Wonogiri	3,325,089.57	15,303,280.47	16,107,795.17	16,977,198.56
13	Karanganyar	6,086,877.13	19,256,516.28	20,262,444.42	21,286,287.14
14	Sragen	3,485,992.03	19,102,181.74	20,169,824.79	21,390,871.20
15	Grobogan	3,578,062.78	14,474,728.93	15,064,456.66	15,962,619.43
16	Blora	2,354,139.78	11,712,504.85	12,227,201.29	12,882,587.70
17	Rembang	2,500,796.46	9,780,750.39	10,284,274.36	10,850,269.20
18	Pati	5,114,682.32	22,329,693.98	23,365,213.99	24,752,325.07
19	Kudus	13,754,585.17	59,944,556.52	62,600,680.87	65,041,047.55
20	Jepara	4,763,305.81	15,623,738.87	16,374,715.21	17,200,365.92
21	Demak	3,302,610.17	13,499,226.47	14,078,419.80	14,913,837.51
22	Semarang	6,223,188.31	25,758,121.08	27,264,112.96	28,769,677.95
23	Temanggung	2,648,488.46	11,299,342.97	11,867,679.59	12,486,494.54
24	Kendal	6,033,632.04	22,386,123.50	23,536,834.39	24,771,543.49
25	Batang	2,611,528.72	11,104,696.78	11,693,897.06	12,327,739.23
26	Pekalongan	3,564,599.07	12,034,805.89	12,630,368.82	13,234,564.04
27	Pemalang	3,813,839.22	13,172,063.61	13,898,669.42	14,673,696.23
28	Tegal	4,001,204.96	18,050,291.97	18,958,841.04	19,992,675.45
29	Brebes	6,082,267.39	23,812,056.92	25,074,171.51	26,572,834.89
Kota					
1	Magelang	1,245,158.09	4,755,092.20	4,992,112.82	5,247,341.27
2	Surakarta	5,742,861.31	25,631,681.32	26,984,358.61	28,453,493.87
3	Salatiga	1,018,183.45	6,989,045.50	7,378,042.82	7,759,181.62
4	Semarang	24,196,487.78	96,985,402.04	103,109,874.91	109,088,689.61
5	Pekalongan	2,324,147.40	5,456,196.88	5,755,282.26	6,043,095.73
6	Tegal	1,408,144.10	8,084,175.73	8,491,325.37	8,953,879.56
<b>Total 35 Kabupaten/Kota</b>		<b>184,483,023.39</b>	<b>726,652,111.09</b>	<b>763,219,714.00</b>	<b>805,043,118.61</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>5,270,943.53</b>	<b>20,761,488.89</b>	<b>21,806,277.54</b>	<b>23,001,231.96</b>

\* Angka Sementara

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2012-2015, diolah.

Selanjutnya pada tahun 2014 dan tahun 2015 Kota Semarang masih mengalami kenaikan PDRB dan menjadikannya Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB tertinggi.

Pada Tabel I-1 secara keseluruhan dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2015 terdapat tiga Kabupaten/Kota yang PDRB-nya tinggi, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus. Kota Semarang mengalami kenaikan PDRB secara pesat karena memang Kota Semarang merupakan pusat dari seluruh kegiatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga pembangunannya pasti lebih di perhatikan serta di prioritaskan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Cilacap juga mengalami peningkatan cukup tinggi karena Kabupaten Cilacap termasuk salah satu dari tiga kawasan industri utama di Jawa Tengah (selain Semarang dan Surakarta). Investor mungkin tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Cilacap karena selain memiliki industri kilang minyak, juga memiliki sektor perikanan laut yang sangat berpotensi jika di kembangkan. Kabupaten Kudus mengalami peningkatan PDRB setiap tahun karena banyaknya industri-industri rokok yang mengalami perkembangan. Di Kabupaten Kudus memiliki beberapa industri rokok yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga tingkat pengangguran berkurang. Berdirinya industri-industri rokok juga menarik investor untuk berinvestasi sehingga membantu Kabupaten Kudus dalam hal pembangunan wilayah.

Tabel I-1 menunjukkan bahwa ada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang PDRB-nya masih rendah. Antara lain Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Blora, Rembang, Temanggung, Batang. Pemerintah seharusnya memberi perhatian yang lebih serius pada Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Tegal, karena empat kota tersebut memiliki PDRB yang sangat rendah di bandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah supaya pembangunan daerahnya tidak tertinggal jauh dengan Kota yang lain. Penyebab rendahnya PDRB di karenakan beberapa faktor di antaranya besarnya tingkat pengangguran, pengeluaran belanja pemerintah serta kurang tertariknya investor menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Dengan uraian latar belakang inilah maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul “**Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2015**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah ?

3. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah ?

### **C. TUJUAN**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijaksanaan dalam pembangunan wilayah.
2. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah PDRB, pengangguran, belanja pemerintah dan penanaman modal asing di daerah.
3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan pembangunan wilayah.

## E. METODOLOGI PENELITIAN

### E.1 Alat dan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan model ekonometrika sebagai berikut:

$$Vw_t = \beta_0 + \beta_1 PM_t + \beta_2 GE_t + \beta_3 UE_t + \varepsilon_t$$

Di mana :

Vw	= Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah
PM	= Penanaman modal asing dan dalam negeri
GE	= Belanja pemerintah
UE	= Pengangguran
$t$	= <i>Time</i>
$\beta$	= Koefisien
$\varepsilon$	= <i>Error</i>

Indeks Williamson dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sjafrizal, 2012) :

$$Iw = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \left(\frac{F_i}{n}\right)}}{Y}$$

Di mana:

Iw	= Indeks Williamson
$Y_i$	= PDRB per Kapita Kabupaten atau Kota i
$Y$	= PDRB per Kapita Provinsi Jawa Tengah
$F_i$	= Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota i
$n$	= Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah

### E.2 Data dan Sumber Data

Data ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dalam Angka. Jenis data yang



digunakan adalah data *time series*. Data *time series* periode tahun 1998-2015 di Provinsi Jawa Tengah.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan ketimpangan pembangunan wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian terdahulu serta hipotesis.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab III menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, serta alat dan metode analisis data.

### **BAB IV          ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang deskripsi data ketimpangan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, pembahasan serta hasil penelitian yang meliputi variabel yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan dan interpretasi hasil.

## BAB V        PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.